

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum hasil penelitian dan pembahasan merupakan pengkajian ulang terhadap pengujian kebenaran atas sesuatu yang sedang di teliti dalam hasil penelitian. Pada pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai yangdiurikan oleh peneliti untuk memberikan penjelasan dan interprestasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitian, jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa hasil penelitian adalah sebuah pembahasan dari hail temuan yang diperoleh. Selain itu, ada bagian pemaparan-pemaparan hasil penelitian sebagai berikut, yaitu meliputi deskripsi dan objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

A. Deskripsi dan Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sebuah isu atau permasalahan yang akan di kaji dalam suatu penelitian. Objek penelitian akan berisi tentang gambaran secara umum lokasi penelitian yaitu di DPRD Kabupaten Demak. Gambaran umum merupakan tempat penelitian diantaranya yaitu meliputi geografi dan gambaran umum DPRD Kabupaten Demak, sejarah kelembagaan, terkait dengan moto pelayanan serta susunan organaisasi kesekretariatan DPRD Kabupaten Demak. Disamping itu pembahasan mengenai hasil penelitian yang relevan dengan judul “Setrategi Komunikasi Politik Ketua DPRD dan Hubungan Masyarakat dalam Membangun Citra Positif DPRD di Media Sosial.

Selanjutnya adapun dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka bab ini terfokus pada hubungan terhadap hasil penelitian dengan berbagai analisi yang akan ditulis sesuai dengan teori yang diambil. Penelitian tersebut akan di paparkan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan hasil temuan dilapangan. Diantara analisis dan hasil penelitian ini yaitu: tentang bagaimana strategi komunikasi Ketua DPRD dan humas dalam membagun citra positif DPRD di media sosial, diawali respon baik terhadap publik melaui media yang dimiliki DPRD Kabupaten Demak, dan juga adanya kerjasama terhadap media cetak dan online serta analisis strategi komunikasi yang digunakan untuk membagun citra positif DPRD di media sosial.

1. Gambaran Umum Lembaga DPRD Kabupaten Demak

Wilayah Kabupaten Demak terletak di bagian utara Pulau Jawa dengan luas wilayah 89.743 ha dengan jarak bentangan Utara ke Selatan 41 km dan Timur ke Barat 49 km dan

berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Adapun Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa adalah kecamatan Sayung, Bonang, dan Wedung. Secara geografis Kabupaten Demak terletak pada 110° 27' 58" - 110° 48' 47" Bujur Timur dan 6° 43' 26" - 7° 09' 43" Lintang Selatan dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut :¹

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- d. Sebelah barat : Kota Semarang

Kabupaten Demak merupakan daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah Kabupaten Demak terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 50.893 ha (56,71%), dan selebihnya adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan teknis 36,11% dan tadah hujan 34,83% dan setengah teknis dan sederhana 29,06%. Sedangkan untuk lahan kering 34,82% digunakan untuk tegal/kebun, 29,60% digunakan untuk bangunan dan halaman, serta 18,17% digunakan untuk tambak.

2. Sejarah Kelembagaan (DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan perwakilan rakyat atau disingkat (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi, kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia. Terdapat pada Undang-undang dasar 1945 pasal 8 ayat 3 dijelaskan tentang “pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat yang keseluruhan anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD diatur lagi sesuai dengan undang-undang terakhir melalui undang-undang dasar Nomor 17 tahun 2014.²

Adapun mengenai terbentuknya DPRD dapat di bagi menjadi tiga:

¹ “Kondisi Letak Geografis Kabupaten Demak”, Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak dalam Angka 2020, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 07.30 WIB. <https://demakkab.bps.go.id/indicator/153/35/1/luas-daerah.html>

² Natacha Ribeiro, “Natacha Ribeiro, ‘Undang-Undang Peraturan Pemerintah Daerah,’ 2014,” 2014.

- a. *Volksraad*
- b. Masa perjuangan
- c. Adanya pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

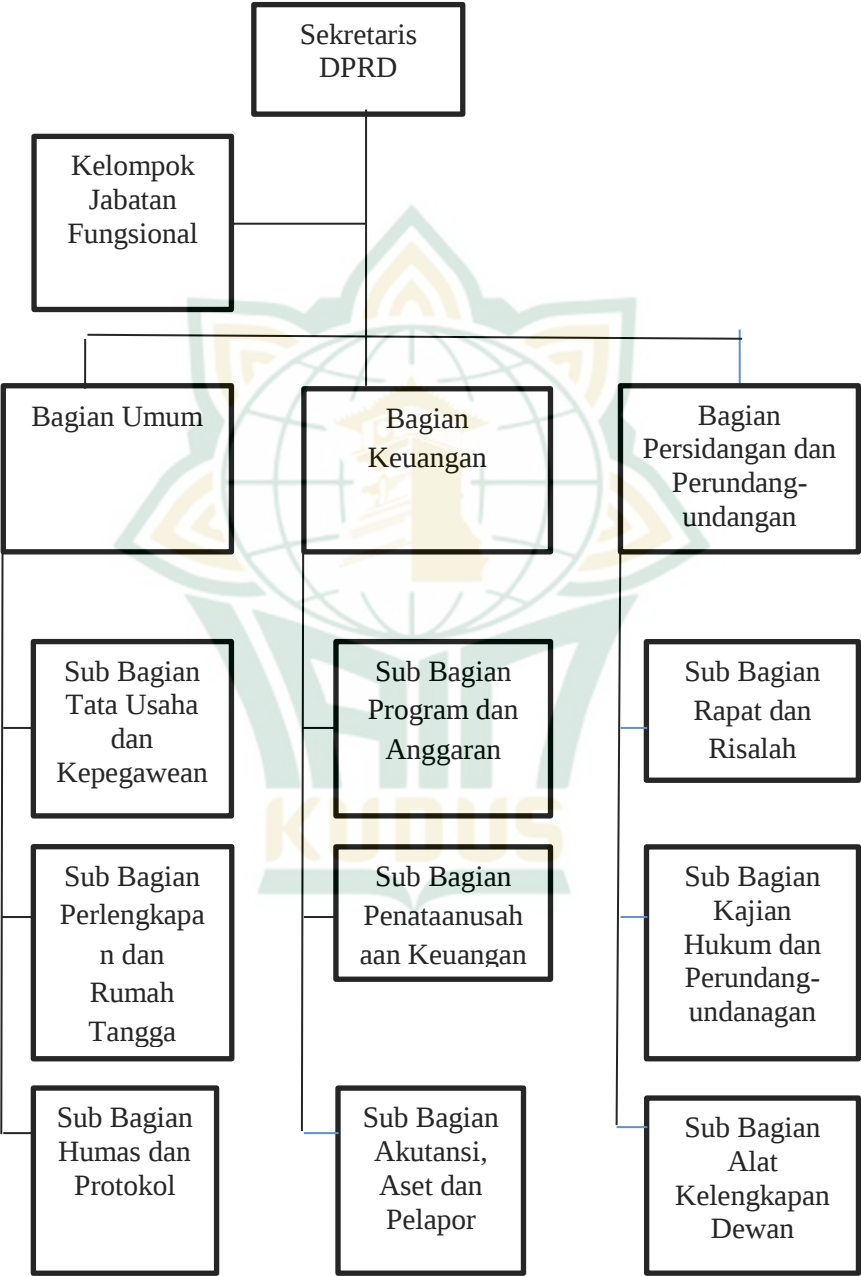
Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan *Volksraad*. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan *Volksraad* secara otomatis sudah tidak diakui lagi keberadaannya, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Sedangkan Lahirnya DPRD Kabupaten Demak yaitu dimulai dari berdiri nya Kabupaten Demak hingga sampai sekarang ini. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak adalah lembaga Legislatif yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Demak. Pada pemilu tahun 2019, DPRD Kabupaten Demak menempatkan 50 orang wakilnya yang tersebar ke dalam beberapa fraksi, dengan perolehan suara terbanyak dioleh Partai PDI Perjuangan, dengan memperoleh 11 Kursi.³

- a. **Moto Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak**
 - 1) Berfikir Cerdas
 - 2) Berfikir Tangkas dan,
 - 3) Bekerja dengan Tuntas
- b. **Nilai Budaya Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak**
 1. *Profesional.*
 2. *Integritas.*
 3. *Transparan.*
 4. *Akuntabel.*
 5. *Responsive.*

³ Dokumentasi; sekretariat DPRD Kabupaten Demak pada tanggal 22 Agustus pukul 12.30.

3. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD
Kabupaten Demak



4. **Susunan Kepegawean Sekretariat DPRD Kabupaten Demak**

Oranisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak terdiri dari:

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD);
- b. Bagian umum, terdapat beberpa sub-sub bagian yang membawakan:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Sub bagian perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
 - 3) Sub Bagian Humas dan Protokol
- c. Bagian Keuangan, terdapat beberapa bagian yang membawakan:
 - 1) Program dan Anggaran;
 - 2) Penatausahaan Keuangan; dan
 - 3) Akutansi, Aset dan Pelaporan.
- d. Bagian persidangan dan perundang-undangan, yang membawakan:
 - 1) Bagian Rapat dan Risalah
 - 2) Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan
 - 3) Bagian Alat Kelengkapan Dewan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

5. **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

- a. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemeberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Demak.
- b. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis bahwa operasionalnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan kemampuan keuangann Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Uraian Tugas

Mengenai uraian tugas Sekretariat DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan fungsi pelayanan DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan fungsi pelayanan DPRD.
- c. Membina, mengarahkan dan memberi petunjuk kebijakan fungsi pelayanan DPRD;
- d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- e. Merumuskan kebijakan teknis kegiatan fungsi pelayanan DPRD sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan;
- g. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Kegiatan Sekretariat DPRD;
- h. Mengkoordinasikan dan pengendalian seluruh kegiatan DPRD;
- i. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan DPRD;
- j. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- l. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan urusan ketatausahaan,

administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan protokol.

Bagian umum dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan protokol;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan protokol;
- c. Pengoordinasian dan pengendalian kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan protokol;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas yaitu:

- a. Merencanakan operasional program kerja dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bagian umum
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan bagian umum.
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas bahwa sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Memberikan arahan petunjuk serta arahan tugas bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait jika ada tugas yang belum dipahami.
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Sekretaris DPRD sesuai tugas di bagian umum.
- g. Melaksanakan urusan ketatausahaan DPRD dan Sekretariat DPRD.
- h. Melaksanakan administrasi kepegawean Sekretariat DPRD.
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.
- j. Melaksanakan pengaturan, pemeliharaan, perawatan dan penggunaan barang-barang investasi serta kendaraan dinas.
- k. Melaksanakan urusan rumahtangga, keamanan/ketertiban kantor dan rumah dinas pimpinan DPRD.
- l. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

- m. Melaksanakan urusan Humas dan Protokol.
- n. Melaksanakan evaluasi dan monitoring program kegiatan di bagian umum.
- o. Mengevaluasi dan melaui prestasi kerja bahwa berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku sesuai ketentuan.
- p. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di bagian umum.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai denga tugas dan fungsi.

Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Sub bagian Humas dan Protokol..
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sub Bagian Humas dan Protokol.
- c. Memberi petunjuk, membagi tugas serta membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kopetensi yang di milkinya.
- d. Melakuakan dan melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
- e. Menyiapkan jadwal kegiatan Pemimpin DPRD.
- f. Menyiapkan dan mengatur tata acara serta tempat pelaksanaan upacara dan acara resmi pimpinan DPRD.
- g. Mempersiapkan dan mengatur penerimaan tamu yang berhak menerima pelayanan keprotokolan.
- h. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan pimpinan dan tamu.
- i. Menyiapkan kebutuhan dan perlengkapan protokol Pimpinan, baik dalam acara dinas maupun perjalanan dinas;
- j. Menyiapkan serta mengadakan koordinasi pihak tamu maupun pihak yang dikunjungi dalam penyusunan acara keprotokolan dan kunjungan kerja;
- k. Menyiapkan dan menyediakan tanda kenang-kenangan oleh Pimpinan, baik dalam bentuk souvenir maupun karangan bunga;
- l. Melakukan pengelolaan informasi bagi media massa/pers;
- m. Melaksanakan perekaman dan mengelola Dokumentasi foto dan Video kegiatan DPRD;

- n. Melakukan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- o. Menyelenggarakan pemberitaan dan publikasi serta menyelenggarakan hubungan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan dan produk kedewanan DPRD;
- p. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dengar pendapat (public hearing);
- q. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- r. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bagian Humas dan Protokol berdasarkan program kerja;
- s. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bagian Humas dan Protokol sesuai hasil pelaksanaan kegiatan;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Aktivitas Media Relation Humas DPRD dalam Membangun Citra Positif di Media Sosial.

Secara kelembagaan aktivitas *media relation* Humas DPRD Kabupaten Demak dijalankan oleh Sub Bagian Humas dan Protokol yang berada di bawah Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. Berikut adalah beberapa program Tahunan yang dijalankan Humas di DPRD Kabupaten Demak, antara lain :

1. Menerbitkan buku profil Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.
2. Menerbitkan Buku Memori Tugas DPRD Kabupaten Demak lima tahunan.
3. Membuat Banner Profil Alat-Alat Kelengkapan DPRD.
4. Menjalin kerjasama kemitraan dengan media massa, cetak maupun online dalam rangka pemuatan berita-berita kegiatan DPRD.
5. Menjalin kerjasama dengan media cetak dalam rangka langganan koran.
6. Mengelola program JDIH untuk penyebarluasan produk hukum DPRD;
7. Mengelola akun-akun media sosial : Facebook, Instagram, dan youtube Humas DPRD Kabupaten Demak sebagai media penyebarluasan informasi kegiatan DPRD Kabupaten Demak.

Adapun upaya yang dilakukan Humas DPRD Kabupaten Demak dalam menjalin hubungan fungsional dengan publik

ialah dengan bekerjasama dengan media-media lokal dalam mentransformasikan informasi (*transparansi informasi dan akuntabilitas*) ke Publik, antaranya yaitu sebagai berikut: ⁴

1. Melakukan kerjasama dalam bentuk advetorial pemuatan informasi kegiatan DPRD Kabupaten Demak melalui media massa.
2. Melakukan kerjasama langganan koran khususnya cetak dengan media massa.
3. Membuat WA Group Mitra Humas DPRD Kabupaten Demak, dimana anggotanya adalah para wartawan media massa yang bertugas di Bima.
4. Secara rutin mengirimkan press release informasi DPRD Kabupaten Demak kepada media.

Humas juga berupaya menyusun konsep dan counter issue (*berita*) yang beredar di masyarakat atau di media massa dengan cepat, kemudian penyiapan naskah kehumasan, penerbitan informasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Kabupaten Demak serta mengupayakan pelayanan melalui media center, agar masyarakat bisa lebih mudah dalam menyapaikan keluhan serta lebih mudah dalam mendapat informasi terkait dengan DPRD.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Strategi Komunikasi Politik Ketua DPRD Kabupaten Demak dalam Membangun Citra Positif DPRD di Media Sosial

Deskripsi data penelitian ini membahas bagaimana strategi komunikasi politik Ketua DPRD dan humas DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif di media sosial. mengenai media massa menjadi kebutuhan bagi masyarakat akan kebutuhan informasi, transfer pengetahuan, dan media komunikasi, serta menjadikan kajian tersebut sebagaimana memberikan informasi kepada masyarakat. Hal itu telah diatur pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Pasal 7 yang artinya, kewajiban badan politik adalah untuk menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan juga dapat

⁴ DIKRIANSYAH, "Strategi Media Relation Humas Sekretariat DPRD Kab. Bantul Dalam Membangun Citra Positif."

memanfaatkan media, berupa media elektronik ataupun non-elektronik.⁵

Adapun strategi yang digunakan Ketua DPRD dalam mengelola media sosial untuk membangun citra positif DPRD di media media sosial yaitu menjadi wadah keterbukaan informasi publik mengenai strategi komunikasi politik ketua DPRD dan humas untuk membangun hubungan dengan publik melalui keterbukaan informasi. Misalnya melalui media Instagram, web, facebook dan youtube. Metode komunikasi politik media sosial dapat memberikan wawasan tentang perilaku politik. Selain itu komunikasi politik adalah suatu strategi atau metode membangun citra politik atau berkaitan dengan suatu opini, karena opini akan muncul dari kehadiran citra politik bagi DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif di media sosial, adapun dengan strategi yang digunakan yaitu sebagai berikut;

- a. Media Instagram
- b. Media Web
- c. Media Facebook
- d. Media Youtube

Komunikasi politik sebagai sebuah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Mengenai proses-proses komunikasi politik ini berjalan secara berkesinambungan dan mencakup pola dimana terjadi pertukaran informasi terhadap individu-individu ataupun kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.

Sedangkan Rusdi Kantaprawita menjelaskan tentang kegunaan komunikasi politik yaitu sebagai sebuah proses menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik dari pola pikir, golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik, terutama pada hubungan masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintahan. Komunikasi politik merupakan kegiatan penyampaian pesan-pesan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lainnya. Adapun menurut Maswadi Rouf tentang komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat suatu kelompok atau masyarakat tentunya.⁶

⁵ Hughes, "Keterbukaan Informasi Publik."

⁶ Strategi, "BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Pengertian Strategi." 9-37

Terkait strategi komunikasi politik maka timbulah hubungan antara lembaga, organisasi maupun perusahaan kepada khalayak atau publiknya, melalui humas publik relations yang dimiliki sehingga dapat membangun citra positif. Citra positif akan membuat publik atau masyarakat memiliki kepercayaan tersendiri akan dari pihak *publik relations*. Sedangkan saluran atau media yang digunakan merupakan alat yang digunakan para aktor komunikator dalam menyampaikan sebuah informasi maupun pesan-pesan politik. Adapun hal tersebut bisa menumbuhkan citra yang baik terhadap lembaga, perusahaan atau manajemen tersebut sebagai berikut melalui media sosial ataupun media cetak



Gambar . 4.1 Wawancara dengan Bapak H. Sri Fahrudin Bisri Selamat, S.E, sebagai ketua DPRD Kabupaten Demak

Adapun upaya strategi komunikasi politik ketua DPRD dalam membangun citra positif DPRD Kabupaten Demak di media sosial sebagai berikut:⁷

Pada zaman sekarang era digital atau media sosial merupakan sebuah era modern di era media sosial sendiri terkadang belum tentu baik, dalam suatu tatannan atau kenyataan, tetapi kita harus ikut serta dalam perkembangan di era media sosial, apapun itu merupakan era zaman sekarang, selain itu juga humas DPRD dapat berperan di media sosial dengan baik. Karena itu kita menjadi keterwakilan rakyat yang harus bisa melayani masyarakat dengan baik, sedangkan kita anggap masyarakat sebagai mandat kita, sebab itu kita juga harus membantu masyarakat dengan baik, maka masyarakat harus di nomor satukan.

⁷ Sri Fahrudin Bisri Selamat, wawancara oleh penulis 22 Agustus 2022, wawancara 1 transkrip

Berdasarkan uraian diatas strategi komunikasi politik humas DPRD juga harus bisa berperan di media sosial agar dapat melayani masyarakat, memberikan informasi dan juga harus dapat mewadai ataupun memberikan respon positif terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, yaitu;⁸

Seperti halnya sesuatu yang telah terjadi di kabupaten Demak yaitu terkait dengan pilkades. terhadap adanya permasalahan-permasalahan. Oleh sebab itu ketika ada masyarakat yang mengadu lewat media sosial maka kita harus merespon dengan baik, cepat dan tepat. Adapun strategi komunikasi humas kepada masyarakat maka lewat media sosial yang kita gunakan . Selain itu kita juga mempunyai aplikasi-aplikasi yang kita miliki diataranya sebagai berikut; *facebook*, *instragram*, dan *web site*. Sehingga masyarakat bisa mudah dalam mengakses media tersebut dengan melaporkan atau berkomunikasi dengan DPRD.

Peneliti juga mengali informasi dari ketua Humas menjelaskan terkait dengan strategi komunikasi politik yang di gunakan dalam membangun citra positif di media sosial yaitu;⁹

Strategi komunikasi politik humas dalam membangun citra positif di media sosial tentunya harus menjalin komunikasi politik yang baik dengan masyarakat melalui media sosial. Memberikan informasi setiap adanya kegiatan DPRD. Selain itu humas juga berkoordinasi dengan media sosial berkaitan dengan kegiatan masyarakat yang akan beraudiensi dengan DPRD. Keterbukaan informasi dengan masyarakat tentunya melauai media-media yang dimiliki DPRD khususnya media sosial yaitu; a). *facebook* b). *instragram* dan c). *web site*. Hal tersebut merupakan wadah bagi DPRD dan masyarakat untuk berkomunikasi dengan mudah melauai media sosial.

2. Strategi Komunikasi Politik Humas DPRD Kabupaten Demak dalam Membangun Citra Positif DPRD di Media Sosial

Strategi komunikasi politik humas DPRD merupakan sebuah fungsi manajemen komunikasi, perannya menciptakan komunikasi, menciptakan hubungan dan menjalin korelasi baik antara organisasi serta pubiknya, berupa pada organisasi maupun pada luar organisasi yg nantinya akan memeberi pengaruh yang

⁸ Sri Fahrudin Bisri Selamat, wawancara oleh penulis, 22 Agustus 2022, wawancara 1 traskip

⁹ Yahya, wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2022, wawancara 2 traskip.

besar terhadap keberhasilan terhadap organisasi itu sendiri. Selain itu setiap instansi atau organisasi pasti membutuhkan citra positif yg baik di kalangan publik. citra yang baik merupakan kebutuhan suatu forum atau organisasi, maka hal ini ialah tugas yang dilakukan oleh humas melalui program humas.¹⁰

Sedangkan komunikasi politik ialah hal yg sangat krusial terhadap proses korelasi antara komunikator dengan komunikan. komunikasi politik juga disebut sebagai jalannya suatu pemerintahan yg sangat erat dengan aktifitas sosial, serta membantu dalam perolehan dukungan serta integrasi politik, diantaranya melalui media sosial, pula berkaitan erat adanya kampanye, propaganda, retorika politik, perundingan, serta pembentukan opini publik.¹¹ Sehingga melalui komunikasi politik Humas dalam memeberikan informasi kepada masyarakat merupakan hal sangat penting dalam mempengaruhi polapikir masyarakat tentunya dalam berkomunikasi terhadap jalanya pemerintahan.

Humas pemerintah merupakan divisi humas millik Negara. Bertugas di pemerintahan pusat ataupun daerah yang menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Humas pemerintahan adalah lembaga pemerintahan yang non profit atau lembaga yang mendukung suatu tujuan pemerintahan yang sejahtera. Selain itu kegiatan humas sendiri yakni melayani masyarakat menciptakan informasi dan komunikasi secara terbuka dengan publik maupun media. dari hal tersebut strategi komunikasi politik humas sangatlah penting untuk menumbuhkan citra positif kepemerintahan DPRD melalui media sosial.

Adapun terkait dengan strategi yang gunakan humas DPRD dalam membangun citra positif di media sosial sangat di perlukan di setiap lembaga ataupun suatu organisasi khususnya pada lembaga DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif di media sosial. Hal tersebut dibuktikan pada tolak ukur humas atau publik relations dalam berkomunikasi terhadap publik atau masyarakat dalam membangun komunikasi yang baik di media sosial, demi terciptanya suatu citra positif yang baik terhadap suatu lembaga, organisasi maupun perusahaan.

¹⁰ Oktarina, "Strategi Public Relations Dalam Mempertahankan Citra Positif Dprd Kabupaten Rejang Lebong."

¹¹ Shahreza, "Proses Dan Elemen-Element Komunikasi Politik."



Gambar ; 4. 2 wawancara kepada ketua Sub Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Demak

Informasi yang disampaikan oleh ketua humas terkait strategi komunikasi politik Humas dalam membangun citra positif DPRD di media sosial, Yaitu;¹²

Humas mempunyai media sosial, ketika ada masyarakat yang merespon kegiatan DPRD ataupun memberi kritikan dan masukan maka humas harus menerima dengan baik, sehingga terbangun interaksi antara DPRD dengan masyarakat, selain itu masyarakat sebagai yang harus di utamakan. pada dasarnya masyarakat disini sebagai urutan yang paling tinggi dalam suatu tatanan negara. Sehingga ketua DPRD dan humas DPRD dapat duduk disini juga karna mandate mereka yakni mandat masyarakat. Selain itu ketika masyarakat membutuhkan harus cepet hadir dan merespon bagaimana keluhan masyarakat, maka harus cepat dalam menanggapi, teruskan, dan juga kita kordinasikan dengan lembaga eksekutif sehingga permasalahan ini menjadi jelas dimasyarkat. Sebab itu hal terpenting tentang bagaimana merespon dengan cepat dan menanggapii hal tersebut dengan baik. Sehingga timbulah citra yang baik terhadap citra positif DPRD.

Adapun pernyataan diatas kita dapat memahami bahwa strategi komunikasi humas dalam membangun citra positif DPRD di media sosial yaitu dengan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan DPRD, memeberikan wawasan kepada masyarakat serta menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik yang sedang terjadi, respon cepat dalam menanggapihnya maka dapat membangun citra positif DPRD.

¹² Yahya, wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2022, wawancara 1 transkrip.

peneliti juga mendapatkan informasi dari humas tentang strategi yang digunakan untuk membangun citra tersebut di media sosial diantaranya; Mengenai Strategi humas DPRD dalam membangun citra positif di media sosial yaitu setiap adanya kegiatan di DPRD harus selalu upload kegiatan tersebut di media sosial. Diantara media sosial tersebut sebagai berikut diantaranya menggunakan media facebook, instagaram dan *website* agar nantinya informasi bisa di akses dan di baca masyarakat dengan mudah, sehingga informasinya dapat diterima oleh masyarakat melalui media-media tersebut. Jadi harapan humas DPRD yaitu terkait dalam membangun hubungan baik melalui media sosial untuk mendapatkan citra positif dari masyarakat atau khalayak .¹³

Selanjutnya peneliti juga mengali informasi dengan Kerjasama humas dengan media-media lain seperti media sosial dan media cetak tentu dapat membangun citra positif DPRD di media sosial yaitu;¹⁴

Sekertaris DPRD juga mempunyai humas, humas tersebut merupakan sebagian dari leading sektornya DPRD Kabupaten Demak, dari situlah umas akan mengkoordinasikan terhadap para wartawan untuk berkolaborasi dan bekerjasama. Adapun mengenai humas sendiri bekerjasama dengan media-media lain, diantaranya ada media cetak, ada Koran, majalah dan poster, selain itu mengenai media-media online yaitu media *tv*, *youtube*, *facebook* dan *web site*. DPRD juga memberikan fasilitas terhadap wartawan ada ruang khusus yaitu disebut dengan room wartawan yang nantinya digunakan humas dan wartawan untuk berkolaborasi dan bekerjasama langsung terhadap media-media lain dengan baik. Seperti dengan media suara medeka, dan humas juga bekerjasama dengan media sosial Jateng.

Selain itu peneliti juga menanyakan kepada ketua Humas dalam kerjasama dengan media-media online maupun media cetak atas strategi komunikasi politik dalam membangun citra positif DPRD, yaitu;¹⁵

Adapun mengenai kerjasama humas dengan media sosial terutama dengan media cetak atau online. Disini humas menginformasikan dulu terkait dengan adanya kegiatan di DPRD, serta saling berkoordinasi dengan media tersebut agar

¹³Yahya, wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2022 wawancara 2, transkrip

¹⁴ Sri Fahrudin Bisri Selamat, wawancara oleh penulis, 22 Agustus 2022 wawancara 1 transkrip.

¹⁵ Yahya. Wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2022 wawancara 2 transkrip

nantinya kerjasama humas terjalin dengan baik. Selain itu humas akan bengkordinasi terhadap para wartawan untuk berkolaborasi dan bekerjasama. Adapun dari humas sendiri bekerjasama dengan media-media lain, diantaranya ada media cetak, ada *Koran*, *majalah* dan *poster*, selain itu mengenai media-media online yaitu *media tv*, *youtube*, *facebook* dan *web site*.

3. Isu-Isu Islam Ditampilkan Humas dalam Membangun Citra Positif DPRD di Media Sosial

Pemaparan tentang strategi komunikasi humas terkait dengan isu-isu islam yang disampaikan oleh Ketua DPRD yang ditampilkan di media sosial dalam membangun citra positif DPRD yaitu;

Humas atau public relations juga berkomunikasi dengan khalayak terkait dengan Isu-isu islam yang di tampilkan di media sosial. Mengenai isu-isu islam yang ditampilkan di media sosial dijelaskan bahwa strategi komunikasi humas ini menangkal paham islam radikal sehingga yang humas kedepankan adalah islam yang rahmatallilamin. Selain itu pertama kali di lantik sebagai ketua DPRD pada tahun 2019 disini ketua DPRD dan Humas DPRD mengadakan DPRD bersholawat dengan mengundang showalat Azzahir. Akan tetapi harapan ketua DPRD setahun sekali akan mengadakan DPRD bersholawat untuk mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemerintahan, sehingga dapat menyatukan tokoh-tokoh tersebut dalam nuansa islam..

Hal tersebut selaras dengan informasi dari humas DPRD kabupaten Demak yang di sampaikan kepada peneliti terkait dengan isu-isu islam yang ditampilkan di media sosial untuk membangun citra positif DPRD di media sosial atas bagaimana strategi komunikasi politik yaitu; Proses-proses dengan mengadakan silaturahmi kepada ulama dan umara' yang dikemas oleh sekretariat DPRD bertujuan agar pejabat dan kiyai mempererat silaturahmi dan juga mengundang khalayak masyarakat untuk ikut serta bersama-sama dalam pengajian akbar.¹⁶

Berdasarkan pemaparan diatas dapat menjadi bukti bahwa isu-isu islam yang ditampilkan di masyarakat merupakan suatu bentuk komunikasi melalui silaturahmi dengan ulama dan umara' yang di selenggarakan oleh DPRD kabupaten Demak dalam

¹⁶Yahya, wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2022 pukul wawancara 2 transkrip.

mempererat silaturahmi yang melibatkan pejabat, ulama', dan khalayak umum untuk ikut serta dalam kegiatan pengajian akbar.

4. Faktor apa yang menghambat dari Komunikasi politik humas DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif DPRD di medi soaial.

Pemaparan dari ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Demak terkait dengan faktor-faktor yang menghambat komunikasi politik humas DPRD dalam membangun citra positif di media sosial, yaitu;¹⁷

Beradanya berita-berita *hoax* menjadi faktor penghambat. Adapun tentang berita tersebut biasanya menyebar dengan pasif, artinya belum tentu kebenaran berita tersebut. selain itu jika ada seseorang yang tidak mengetahui tentang kinerja DPRD. Disisi lain ketika masyarakat mengirim pesan lewat media Instragram maka humas DPRD harus menanggapi dengan baik. mengenai hal tersebut tujuan humas adalah memberikan yang terbaik, bahwasannya humas disini memberikan kejelasan terkait dengan kejelasan kinerja DPRD. Pada dasarnya humas DPRD terbuka dengan masyarakat, juga tidak anti kritik dan humas bisa menerima masukan maka insyaallah bisa berjalan dengan baik. Jadi harmoni ini bisa kita jaga antara yang punya mandate dan yang diberi maandat "adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat akan timbul pula hal-hal positif terhadap citra positif DPRD terutama di media sosial".

Adapun informasi dari ketua humas sekretariat DPRD kabupaten Demak yang disampaikan kepada peneliti dalam faktor-faktor yang mengahambat jalannya strategi komunikasi politik humas dalam membagun citra positif DPRD di media sosial, yaitu:¹⁸

Penerapan strategi komunikasi politik humas DPRD dengan Kendala yang terjadi yaitu terkit dengan jaringan internet yang terkadang masih kurang mendukung namun untuk mengatasi hal tersebut dengan menambahkan wifi atau kapasitas jaringan internet. Selain itu juga adanya berita-berita *hoax*, yang mana berita tersebut bersifat pasif serta belum tentu kebenarannya, sehingga dapat menimbulkan kegaduhan atas berita yang sudah beredar dimedia sosial

¹⁷ Sri Fahrudin Bisri Selamat, wawancara oleh penulis, 22 Agustus 2022 wawancara 1 transkrip.

¹⁸ Yahya, wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2022 wawancara 2 transkrip.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Strategi Komunikasi Politik Ketua DPRD Kabupaten Demak dalam membangun Citra Politik DPRD di Media Sosial.

Strategi komunikasi politik perlu dilakukan agar kegiatan *publik relations* dalam membangun citra positif DPRD kabupaten Demak berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, agar pencapaian suatu tujuan yang memungkinkan untuk mendiskusikan masalah atau memberikan informasi terkait apa yang sedang di bahas. *Rush* dan *Altoff* menjelaskan tentang komunikasi politik, dimana proses penyampaian pesan politik yang relevan ditentukan dari satu bagian sistem politik ke bagian lainnya, dan hubungan antara sistem sosial dan politik.¹⁹

Harjani Hefni memaparkan komunikasi dibangun atas prinsip-prinsip islam yang memiliki ruh kedamaian, keramahan dan keselamatan.²⁰ Berpedoman dengan Al-Qur'an dan Sunnah, komunikasi islam adalah komunikasi yang berupaya membangun hubungan dengan diri sendiri, dengan sang pencipta serta sesama untuk menjadikan komunikasi kedamaian, keramahan, serta keselamatan terhadap diri dan lingkungan dengan cara tunduk pada perintah Allah dan Rasul-nya. Komunikasi islam merupakan komunikasi yang bernuansa nilai-nilai islam dalam upaya membangun kedamaian, keramahan, serta mejalin komunikasi yang harmonis terhadap sesama. Tindakan tersebut dilakukan oleh individu, perusahaan ataupun lembaga organisasi..

Seperti halnya pemaparan penelitian diatas bahwa komunikasi politik sebagai sebuah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem sosial dengan sistem-sistem politik. mengenai proses-proses komunikasi politik ini berjalan secara berkesinambungan dan mencakup pola dimana terjadi pertukaran informasi terhadap individu-individu ataupun kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.

Adapun strategi komunikasi politik Ketua DPRD dalam membangun citra positif. maka tujuan utama dalam proses membangun citra yang baik di masyarakat yaitu upaya

¹⁹ A P Soemarno, "Hakikat Komunikasi Politik Tinjauan Filosofis, Teoritis, Empiris Dan Hakikat Feedback Atau Respons," *Pustaka.Ut.Ac.Id*, n.d., 1–36.

²⁰ Dian Iskandar Jaelani, "Manajemen Public Relation (Humas) Pendidikan Islam: Kajian Tematik Al Quran Dan Hadists 7, no. 2 (2014): 107–15.

membangun kedamaian, keramahan, dan juga harus menjalin komunikasi yang baik, serta harus bisa berperan di media sosial agar dapat melayani masyarakat, memberikan informasi dan juga dapat mewadai ataupun memberikan respon positif terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat.

Humas merupakan sebuah komunikasi yang terbentuk dan terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik, untuk itu pada dasarnya saling pengertian.²¹ Menegenai penjelasan *publik relations*, maka dapat di artikan sebagai suatu kinerja yang sudah terencana dalam upaya membentuk opini publik yang baik sehingga timbul citra perusahaan yang baik dan upaya menjalin hubungan saling adanya pengertian yang bersifat hubungan timbal balik dengan masyarakat/publik.

Menurut Faruq Alhasbi mendefinisikan dakwah sebagai sistem komunikasi dimana adanya interaksi antara individu ataupun sekelompok manusia yang bertujuan memindahkan umat dari situasi yang negative (*jahiliyah*) menuju situasi positif. Menegenai definisi tersebut bisa dikatakan makna dari *public relations*, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk mencapai hubungan harmonis antara institusi/perusahaan dengan publiknya, serta untuk menciptakan opini public yang positif melalui bentuk hubungan komunikasi politik instansi/perusahaan tersebut.²²

Seperti halnya yang di ungkapkan Bapak Fahrudin Bisri Selamat yang mengatakan bahwa humas *publik relation* dalam membangun citra positif di media sosial tentunya kita harus menjalin komunikasi politik yang baik dengan masyarakat melalui media sosial. Memberikan informasi setiap adanya kegiatan DPRD. Selain itu kita juga berkoordinasi dengan media sosial, berkaitan dengan kegiatan masyarakat yang akan beraudiensi dengan DPRD. Dengan demikian melalui humas public relation, setiap komunikasi, informasi maupun pesan-pesan politik terkait tentang pemerintahan daerah kabupaten Demak. humas dapat membina hubungan yang harmonis antara DPRD Kabupaten Demak dengan publiknya, tentu khalayak sasarannya.

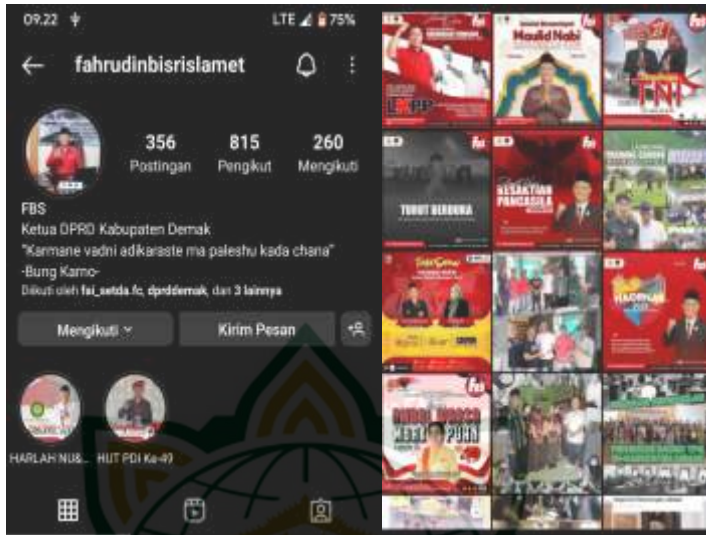
²¹ Onainor, "Peran Humas Pada Organisasi" Vol 1, 2019, 105-112.

²² Slvianajayanti, "مردان غير ورزشكار." Praktik Public Relation Dalam Pandangan Islam, 134-154

Melalui media sosial menjadi wadah aktor politik dalam berkomunikasi berbasis internet. diantaranya media sosial seperti *facebook*, *instragram*, dan *web site* yang digunakan oleh siapa saja untuk tujuan tertentu sesuai dengan keinginan. Media sosial sangat berpengaruh dalam memengaruhi opini publik. Selain itu dalam meraih dukungan melalui media sosial menjadi lebih cepat dalam menyampaikan pesan. Karena itu, media sosial telah menempatkan ruang demokrasi dalam ajang baru dari perspektif komunikasi politik. Dengan demikian, media sosial sebagai sarana komunikasi memiliki peran membawa orang (*penggunanya*) untuk berpartisipasi secara aktif dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, baik untuk membagi informasi maupun memberi respon secara online dalam waktu yang cepat.

Humas mempunyai medsos atau media sosial. Selain itu adanya masyarakat yang merespon kegiatan humas ataupun memberi kritikan dan masukan maka humas DPRD harus menerima dengan baik, sehingga terbangun interaksi antara DPRD dengan Masyarakat, pada dasarnya masyarakat sebagai titik teratas di suatu Negara yang menganut demokrasi. Sehingga ketua DPRD dan humas DPRD dapat duduk disini juga karna mandate mereka yakni mandat masyarakat. Ketika kita membutuhkan maka kita harus cepat hadir dan merespon bagaimana keluhan masyarakat, harus menanggapi, teruskan, dan juga mengkordinasikan dengan lembaga eksekutif sehingga permasalahan ini menjadi jelas dimasyarakat. Oleh sebab itu hal terpenting adalah respon cepat kita dalam menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut, ketika adanya suatu permasalahan dan kritikan kita harus cepat tanggap dalam menanggapi sehingga bisa membangun citra positif DPRD di media sosial”.²³

²³ Sri Fahrudin Bisri Selamat, wawancara oleh penulis, 22 Agustus 2022 wawancara 1 transkrip.



Gambar 4.5 akun resmi Ketua DPRD Kabuapten Demak.

Akun resmi Bapak Fahrudin Bisri Selamat memiliki 815 follower (*pengikut*). Akun resmi yang dimiliki akan mempermudah komunikasi *vertikal*, antara komunikasi Ketua DPRD dengan masyarakat. Adapun jumlah follower 815 merupakan pengikut atau massa yang mengikuti rutinitas Ketua DPRD. Fahrudin Bisri Selamat bisa dengan mudah mem-posting dengan mudah kegiatan pemerintahan dan kinerna pemerintahan kabupaten Demak, sebagai bukti kinerja DPRD dalam memberikan informasi, pesan-pesan politik, saran dan juga masukan kepada khalayak masyarakat kabupaten Demak dalam membangun hubungan baik atau citra positif, sehingga DPRD dengan masyarakat bisa lebih mudah berkomunikasi lewat media sosial tersebut.

Adapun mengenai strategi yang di gunakan ketua DPRD Bapak Fahrudin Bisri Selamat dalam membangun citra positif DPRD yaitu dengan menggunakan media sosial yang dimiliki Bapak Fahrudin Bisri Selamat. Media tersebut sebagai kontribusi kepada masyarakat untuk berkomunikasi langsung melalui media sosial selain itu media sosial juga dapat mem-posting kegiatan-kegiatan DPRD, agar informasi, pesan-pesan politik tersampaikan kepada masyarakat dengan adanya postingan tersebut. Oleh karena itu hal tersebut merupakan strategi komunikasi politik ketua DPRD dalam membangun citra positif DPRD di media sosial. Hasil wawancara dengan ketua DPRD mengatakan sebagai berikut; “ untuk akun instragram,

yang memegang saya sendiri dan juga dibantu staf dengan menggunakannya sebagai komunikasi kepada masyarakat”.²⁴

Publik Relations atau humas DPRD tidak hanya berperan menciptakan hubungan baik dengan publik dan menjadi padam ketika perusahaan atau lembaga terlanda krisis, namun kinerja *publik relations* mencakup lebih luas. menurut Dozier & Broom bahwa peranan *Publik Relations* terbagi menjadi empat kategori dalam suatu organisasi, yaitu;²⁵

a. Expert Prescriber

Sebagai *Publik Relations* yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (*Publik Relationship*). Hubungan praktisi ahli PR dengan manajemen organisasi seperti hubungan antara dokter dengan pasiennya, sehingga pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai apa yang telah disarankan atau usulan dari ahli PR (*Expert Prescriber*) yang memiliki pengalaman dan keterampilan tinggi dalam memecahkan serta mengatasi persoalan *Publik Relations* yang tengah dihadapi oleh organisasi bersangkutan. Hal ini menunjukan bahwa Humas di DPRD Kabupaten Demak telah menjalankan perannya sebagai penasihat ahli. Salah satu peran yang dilakukan Humas yaitu sebagai penasihat ahli (*Expert prescriber*) dimana seorang humas atau *publik relations* harus memiliki pengalaman dan kemampuan yang tinggi sebab humas sendiri harus dapat membantu mencari solusi dalam menyelesaikan masalah publik.

b. Communication Fasilitator

mengenai hal ini, praktisi *Publik Relations* bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya dari organisasi yang bersangkutan, sekaligus harus menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan adanya komunikasi timbal balik yang dilaksanakan oleh *Public Relations* bersangkutan dapat

²⁴ Sri Fahrudin Bisri Selamat, wawancara oleh penuls, 22 Agustus 2022 wawancara 1 traskrip.

²⁵ Haeril, Mas'ud, and Irfadat, “Peran Humas DPRD Dalam Menjaga Kinerja Dan Citra DPRD (Studi Pada Dprd Kabupaten Bima).” *Journal of Government and Politics*, Vol. 2 No. 2 (2020). 153-165

tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak. Hal tersebut sama halnya dengan Humas DPRD Kabupaten Demak sebagai fasilitator Komunikasi (*Communication Fasilitator*) berupa elemen penting yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pemerintah khususnya DPRD. Artinya humas memiliki peran terhadap jalannya fasilitator Komunikasi antara pemerintah dengan publiknya.

Humas bertindak sebagai komunikasi atau mediator yang harus membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Diantara hal tersebut sebagai wadah penghubung antara pihak DPRD Kabupaten Demak dengan masyarakatnya agar proses komunikasi dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak DPRD dapat berjalan sesuai harapan, maka peran humas DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif salah satunya dengan menyampaikan informasi ke publiknya.

c. Problem Solving Process Fasilitator

Peranan praktisi *Public Relations* merupakan proses pemecahan persoalan *Public Relations* ini, adalah bagian tim manajemen untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat (*adviser*) hingga mengambil tindakan eksekusi (*keputusan*) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional. Biasanya dalam menghadapi persoalan-persoalan krisis, maka dibentuk suatu tim posko yang dikoordinir praktisi ahli *Public Relations* dengan melibatkan berbagai departemen dan keahlian dalam satu tim khusus untuk membantu organisasi, perusahaan, dan produk yang tengah menghadapi atau mengatasi persoalan krisis tertentu.

Kehadiran Humas DPRD Kabupaten Demak sebagai fasilitator proses pemecahan masalah (*Problem Solving Procces Facilitator*) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam terciptanya citra yang baik dimata masyarakat. Membentuk citra yang baik ini sangat penting bagi organisasi atau instansi pemerintahan maupun non pemerintahan. Sebagai fasilitator proses pemecahan masalah, Humas DPRD Kabupaten Demak telah menjalankan perannya dengan baik. Humas DPRD Kabupaten Demak berkolaborasi dengan pimpinan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dimasyarakat Kabupaten Demak.

Terutama untuk menghindari adanya isu-isu negatif di masyarakat, keberadaan humas sangat diperlukan untuk menjadi penengah dan pemberi solusi agar masyarakat tidak membuat isu-isu negatif yang belum tentu kebenarannya.

Mengenai uraian-uraian diatas humas DPRD sebagai peran penting dalam berkomunikasi. *Expert prescriber* yaitu humas sebagai penasehat dan juga harus memiliki pengalaman dan kemampuan yang tinggi dapat membantu mencari solusi dalam menyelesaikan masalah publinya. Adapun hal tersebut yang nantinya masyarakat bisa lebih mudah dalam berkomunikasi politik kepada DPRD kabupaten Demak. Komunikasi tersebut adalah bentuk strategi komunikasi yang digunakan DPRD yaitu;

Humas harus bisa mewadai ataupun memberikan respon positif terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat. Seperti halnya sesuatu yang terjadi di Kabupaten Demak yaitu mengenai pilkades, maksudnya ketika ada suatu permasalahan atau sebagainya. Maka ketika ada masyarakat yang mengadu lewat media sosial humas harus merespon dengan cepat dan tepat. Disitulah bentuk komunikasi humas dengan masyarakat lewat media sosial yang kita miliki. Selain itu juga mempunyai aplikasi-aplikasi yang dimiliki Humas DPRD diantaranya ada facebook, instagram, dan web. Sehingga masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses media tersebut dengan melaporkan atau berkomunikasi dengan DPRD”.²⁶



Gambar; 4.6 kegiatan bersama pelatihan peningkatan SDM tenaga pendidikan

²⁶ Sri Fahrudin Bisri Selamat, wawancara oleh penulis, 22 Agustus 2022 wawancara 1 transkrip.

Salah satu postingan yang menunjukkan kegiatan DPRD dalam pelatihan peningkatan SDM Tenaga Pendidikan non formal kepengurusan TPQ Se-Kabupaten Demak. Postingan tersebut merupakan bentuk komunikasi Ketua DPRD dan Humas untuk memberikan wadah bagi peningkatan SDM tenaga pendidikan bagi non formal dengan mengundang pengurus Badko TPQ se-Kabupaten Demak

Adapun dengan simpulan hasil wawancara yang sudah peneliti dapatkan maka hal tersebut sesuai dengan teori *Expert prescriber*. Dapat kita lihat bahwa strategi yang digunakan dalam membangun citra positif di media sosial yaitu adanya strategi komunikasi yang baik berupa mawadai ataupun memberikan respon positif terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat diantara permasalahan yang sedang terjadi. Artinya hubungan baik kepada khalayak sangat diperhatikan oleh humas publik relation DPRD bagaimana peran humas dalam memberikan informasi dan respon baik terhadap publiknya.



Gambar 4.7 pamflet ketua DPRD Demak dalam menyambut hari peringatan mauled Nabi Muhammad SAW

Selain itu salah satu postingan ketua DPRD mengenai isu-isu islam ditampilkan di media sosial merupakan salah satu strategi komunikasi politik. postingan tersebut ingin menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat atas peringatan Maulid Nabi SAW yang dilakukan untuk memberikan informasi terkait dengan hari-hari besar Islam. Adapun dengan postingan selalu memberikan informasi-informasi baik kepada khalayak

masyarakat. seperti hasil wawancara saya kepada Ketua DPRD Fahrudin Bisri Selamat yaitu;

Ketua DPRD dan humas menangkal faham islam radikal sehingga yang diutamakan dan dikedepankan adalah islam yang Rahmatallilalamin. Selain itu disaat Ketua DPRD pertama kali di lantik sebagai ketua DPRD pada tahun 2019, mengadakan acara syukuran dengan tema DPRD bersholawat serta mengundang showalat Azzahir. dibulan Agustus ini akan lagi mengadakan lagi DPRD besholawat namun terkendala dengan adanya jalan macet dan nantinya akan di undur dan disesuaikan setelah kemacetan sudah terselesaikan atau nantinya di atur lagi jadwalnya. Tetapi harapannya setahun sekali akan mengadakan DPRD bersholawat untuk mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemerintahan, sehingga dapat menyatukan tokoh-tokoh tersebut dalam nuansa islami.²⁷

Berdasarkan pencapaian Strategi Komunikasi Politik Ketua DPRD Fahrudin Bisri Selamat dalam membangun citra positif melalui media sosial dapat penulis simpulan bahwa upaya dalam mengedepankan komunikasi dengan masyarakat dengan respon cepat dan hubungan baik kepada masyarakat serta menangkal islam yang *radikal* dengan mengedepankan Islam yang *Rahmatallilalamin*. Diatara hal tesebut memberikan informasi, menyampaikan pesan-pesan politik, saran dan masukan kepada masyarakat, serta selalu bersilaturahmi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga segenap warga/masyarakat kabupaen Demak salah satunya melalui DPRD bersholawat. Sehingga adanya nuasa tersebut membawa warga/masyarakat untuk berbondong-bondong meramaikan acara tesebut.

2. Strategi Komunikasi Politik Humas DPRD dalam membangun Citra Positif

Humas adalah sebuah fungsi manajemen komunikasi, perannya menciptakan komunikasi, membangun serta menjalin hubungan baik antara organisasi dan pubik, berupa dalam organisasi maupun di luar organisasi yang nantinya akan memeberi pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan terhadap organisasi itu sendiri. Selain itu setiap istansi atau organisasi pasti membutuhkan citra positif yang baik di

²⁷ Sri Fahrudin Bisri Selamat, wawancara oleh penulis, 22 Agustus 2022 pukul wawancara 1 transkrip.

kalangan public. Citra yang baik merupakan kebutuhan suatu lembaga atau organisasi, maka hal ini merupakan tugas yang dilakukan oleh humas melalui program humas.²⁸ praktik Humas atau *Public Relation* itu sendiri, tentang publikasi pemerintahan. Publikasi merupakan upaya humas dalam memberi informasi dan juga menciptakan pemahaman kepada masyarakat (*publik*) mengenai instansi terkait pemerintahan. Penyebaran informasi bisa dilakukan dengan cepat menggunakan media massa. Media masa juga dapat memberikan dan membantu menciptakan opini kalayak. seperti halnya opini khalayak nantinya dapat membawa (*image*) positif pula dari publik.

Humas atau *publik relations* merupakan majenemen komunikasi yang dimiliki oleh suatu lembaga, organisasi ataupun perusahaan, dalam upaya memeberikas informasi, masukan dan saran kepada khalayak publik.²⁹ Hal tersebut peneliti juga mendapatkan informasi dari bapak Yahya sebagai ketua humas DPRD, Menjelaskan sebagai berikut;

Sekertaris DPRD juga mempunyai humas, humas tersebut merupakan sebagian dari leading sektornya DPRD Kabupaten Demak, dari situlah humas akan mengkordinasikan terhadap para wartawan untuk berkolaborasi dan bekerjasama. Adapun dari humas sendiri bekerjasama dengan media-media lain, diantaranya ada media cetak, ada Koran, majalah dan poster, selain itu mengenai media-media online yaitu media *tv*, *youtube*, *instagram*, *facebook* dan *web site*.



Gamabar 4.8 akun resmi media sosial Instagram DPRD kabupaten Demak

²⁸ Qadri, "Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik." Jurnal hukum tata Negara no, 1 vol 1, 2020. 49-53

²⁹ "Peran Humas dalam Pelayanan Keluhan," n.d., 1-102.

Salah satu akun resmi DPRD yang di kelola Humas memiliki 1.936 follower (pengikut). Akun resmi yang dimiliki akan mempermudah komunikasi vertikal, antara komunikasi humas DPRD dengan masyarakat. Adapun jumlah follower 1.936 merupakan pengikut atau massa yang mengikuti rutinitas Humas DPRD. Humas DPRD bisa dengan mudah mem-posting dengan mudah kegiatan pemerintahan dan kinerja pemerintahan kabupaten Demak, sebagai bukti kinerja DPRD dalam memberikan informasi, pesan-pesan politik, saran dan juga masukan kepada khalayak masyarakat kabupaten Demak dalam membangun hubungan baik atau citra positif, sehingga DPRD dengan masyarakat bisa lebih mudah berkomunikasi lewat media sosial tersebut.

Kegiatan humas atau *public relations* pada dasarnya merupakan bagian dari teknik kegiatan berkomunikasi (*technique of communication*) dapat diartikan sebagai komunikasi dua arah antara lembaga atau organisasi yang diwakilinya dengan publiknya ataupun sebaliknya. Sama halnya dengan informasi yang saya dapatkan dari hasil wawancara kepada humas DPRD bapak Yahya, yaitu; Humas DPRD menjalin komunikasi politik yang baik dengan masyarakat melalui media sosial. Memberikan informasi kepada masyarakat setiap ada kegiatan DPRD, selain itu juga mengkoordinasi dengan media-media sosial serta memposting kegiatan DPRD dengan masyarakat yang beraudiensi dengan DPRD”.³⁰

Peran humas sebagai fasilitator komunikasi dimana humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya.³¹ Sebagai penghubung antara pihak DPRD Kabupaten Demak dengan masyarakatnya agar proses penyampaian informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak DPRD dapat berjalan dengan lancar maka humas DPRD Kabupaten Demak melaksanakan peran humas dengan menyampaikan informasi ke publik.

Pada dasarnya peran Humas sendiri sebagai fasilitator proses pemecahan masalah berarti humas membantu Pimpinan organisasi, baik menjadi penasehat hingga berperan mengambil langkah dalam mengatasi persoalan yang dihadapi secara rasional dan professional. Peran humas sebagai fasilitator proses

³⁰ Yahya, wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2022 wawancara 2 transkrip.

³¹ “Peran Humas dalam Pelayanan Keluhan,” n.d., 1–102.

pemecahan masalah sudah diwujudkan oleh humas DPRD Kabupaten Demak dengan memberikan pelayanan yang baik, menampung aspirasi masyarakat, kritik dan juga saran, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang ada.

Selain itu peran humas juga sebagai teknisi komunikasi memiliki perbedaan dari ketiga peran humas yang sebelumnya. Peranan teknik komunikasi berhubungan dengan bagaimana alur atau proses Peran Humas dalam memberikan citra positif pada Lembaga DPRD Kabupaten Demak. Peran humas sebagai teknisi komunikasi menunjukkan bahwa peran humas berkaitan dengan bagaimana teknik humas dalam mengkomunikasikan informasi ke publiknya. Alur kegiatan kehumasan di DPRD Kabupaten Demak dengan mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan masyarakat, kemudian hal itu dirapatkan terlebih dahulu dengan yang bersangkutan, baru dibuatkan rencana kedepannya untuk diinformasikan kepada masyarakat jika tuntutan atau aspirasinya sudah didengar oleh pihak DPRD dan akan direalisasikan kedepannya.

Seperti halnya tuntutan massa dalam upaya terhadap pencemaran lingkungan disebabkan oleh adanya kandang ayam dengan kapasitas besar di desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Untuk merespon itu Humas DPRD Kabupaten Demak merilis berita tersebut di media dan memposting di akun Instagram resmi milik DPRD Kabupaten Demak. Sehingga pada 24 Januari dari pihak DPRD mengadakan Audiensi terkait dengan permasalahan tersebut dan dilakukan di ruang rapat pimpinan DPRD Kabupaten Demak. Dengan dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah terkait antara lain Dinpermapdes Kabupaten Demak, Sekretaris Dinas PMPTSP, Dinas Pertanian dan pangan, Dinas lingkungan hidup, kepala bagian hukum SETDA, Kepala seksi penataan dan pemberdayaan ART/BPN, ka.Bag umum Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, Plt Sekcam Kabupaten Demak, Camat sayung dan Kepala Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak serta perwakilan dari warga Surodadi Kecamatan sayung.

Media sosial merupakan sarana menyampaikan informasi dan pesan-pesan, sebagai alat komunikasi untuk menyebar luas berita ataupun informasi kepada masyarakat langsung secara luas. Media memiliki peran yang ampuh dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu seperti halnya humas DPRD Kabupaten Demak menggunakan media sosial intragram, web sebagai sarana dalam memberikan informasi dan

kegiatan-kegiatan DPRD di media sosial tersebut. Setelah kegiatan dilakukan maka pihak *public relations* melakukan analisis untuk mengetahui efek atau *feed backnya*, apakah hal tersebut berdampak baik terhadap citra, atau sebaliknya menjadi negative sehingga kurang menguntungkan posisi organisasi atau lembaga bersangkutan di mata masyarakat.

Selain itu fungsi penting dari humas khususnya di lembaga DPRD Kabupaten Demak yaitu sebagai representasi rakyat, adalah melakukan langkah-langkah dalam rangka menciptakan, membangun, meningkatkan dan menjaga citra DPRD di hadapan publik, sehingga melahirkan kepercayaan serta dukungan publik terhadap kebijakan DPRD secara kelembagaan. Dalam konteks itu, selama ini Humas di DPRD Kabupaten Demak melakukan langkah-langkah sebagai berikut;

- a. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan suatu organisasi.
- b. mengajarkan hubungan harmonis antara organisasi dengan public internal maupun publik eksternal.
- c. Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini public kepada organisasi.
- d. Melayani public dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum.
- e. Operasionalisasi dan organisasi public relations adalah bagaimana membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya, untuk mencegah terjadinya rintangan psikologis, baik yang ditimbulkan dari pihak organisasi maupun dari pihak publiknya.

Adapun dalam kegiatan dan oprasional Humas atau *Publik Relation* pasti ada tujuan tersendiri, tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan dengan tujuan tertentu baik secara umum maupun secara khusus. Terutama pada kegiatan humas atau *public relations* Ketua DPRD dan Humas DPRD dalam menumbuhkan citra positif di media sosial, membangun opini yang baik bagi perusahaan, organisasi maupun sebuah lembaga, maka dapat memberikan citra baik terhadapnya terutama pada lembaga pemerintahan DPRD kabupaten Demak.

3. Isu-Isu Islam Ditampilkan Humas dalam Membangun Citra Positif DPRD di Media Sosial.

Pentingnya humas atau *public relations* DPRD dalam membangun citra positif di media sosial, dengan tujuan untuk mempermudah instansi pemerintahan. khususnya pemerintahan

DPRD Kabupaten Demak dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang telah mereka lakukan, seperti halnya penyebaran informasi, kebijakan, penyerapan aspirasi masyarakat, dan sosialisai-sosialisasi serta isu-isu atau opini yang ditampilkan humas dalam membangun citra DPRD di media sosial mengenai peraturan atau kegiatan yang telah di sepakati oleh bupati dan publik.



gambar; postingan tribunnews kegiatan silaturahmi kebangsaan di halaman kantor DPRD Kabuapten Demak

<https://jateng.tribunnews.com/2019/08/22/ketua-sementara-dprd-demak-ajak-masyarakat-lebih-bijak-menggunakan-media-sosial>

Dilihat dari gamabar postingan di media sosial, atas kerjasama dengan media-media lain. Postingan tersebut menjelaskan bahwa ketua DPRD Fahrudin Bisri Selamat sendiri, mengajak semua elemen masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial sendiri merupakan saluran atau sarana sosial yang berbasis online. Adapun upaya humas yakni meng-sear dan memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan DPRD kabupaten Demak. Selain itu dalam acara tersebut di hadiri oleh beberapa tokoh agama, tokoh mayarakat, serta bersama sholawat azzahir. Tujuan tersebut adalah bentuk silaturrahi yang di selenggarakan atas rasa syukur kepada ALLAH SWT. Mengenai hal itu peneliti juga menggali informasi kepada humas DPRD, yaitu;

“Dengan mengadakan silaturrahi kepada ulama dan umara’ yang dikemas oleh secretariat DPRD bertujuan agar

pejabat dan kiyai mempererat silaturahmi dan juga mengundang khalayak masyarakat untuk ikut serta bersama-sama dalam pengajian akbar”³².

Humas DPRD Kabupaten Demak sebagai bidang publikasi, manajemen informasi dan komunikasi, sangat rutin melakukan publikasi informasi pada media sosial milik DPRD Kabupaten Demak sebagai bentuk transparansi informasi publik. Termasuk yang berkaitan dengan Jadwal harian kegiatan DPRD Kabupaten Demak yang terpublish dengan baik, mulai dari waktu kegiatan, agenda, dan tempat yang sudah di siapkan. Adapun strategi komunikasi politik humas DPRD dalam membangun citra positif di media sosial tugas humas atau publik relation sangat berperan terhadap jalannya komunikasi antara lembaga DPRD dengan khalayak masyarakat. Melalui media sosial humas dapat memberikan informasi dan pesan politik kepada masyarakat demi mewujudkan hubungan yang baik dengan semua pihak khalayak.

4. **Faktor-Faktor Penghambat dalam Membangun Citra Positif di Media sosial**

Strategi yang dilakukan Humas tidak hanya dapat memperoleh kepercayaan publik dan memperoleh citra positif, namun citra positif yang telah terbangun perlu ditingkatkan, karena berdampak besar terhadap reputasi pemerintah, jika reputasi pemerintah tidak baik, maka kepercayaan masyarakat akan hilang, selain itu jika dipudarkan dengan reputasi negatif maka akan sulit bagi pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Humas memainkan peran pentingnya dalam membentuk citra pemerintah. Selain itu Faktor-faktor penghambat kendala yang dapat menghambat strategi komunikasi ketua DPRD dan humas DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif di media sosial, tentang bagaimana pemaparan dari ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Demak terkait dengan faktor-faktor yang menghambat komunikasi politik humas DPRD dalam membangun citra positif di media sosial, yaitu;

Terkadang berita-berita hoax yang menjadi faktor penghambatnya berita-berita tersebut menyebar dengan masif, artinya belum tentu kebenaran berita tersebut, katakanlah ada seseorang yang tidak mengetahui tentang kinerja DPRD. Disisi

³² Yahya, wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2022 wawancara 2 transkrip.

lain juga ketika masyarakat mengirim pesan lewat misal Instragram maka humas harus tanggap dengan baik. Adapun mengenai hal tersebut tujuan dari strategi komunikasi humas adalah memberikan yang terbaik, bahwasannya disini memberikan kejelasan terkait dengan kejelasan kinerja DPRD. Pada dasarnya terbuka dengan masyarakat humas juga tidak anti kritik dan kita juga bisa menerima masukan maka insyaallah bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu hubungan harmoni bisa kita jaga antara yang punya mandat dan yang diberi mandat. Dengan ini adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat akan timbul pula hal-hal positif terhadap citra positif DPRD terutama di media sosial³³

Adapun pemaparan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam menghadapi berita hoax yang masih masif di internet DPRD Demak melakukan komunikasi politik dengan memberikan klarifikasi mengenai berita hoax yang beredar dimasyarakat. Selain itu DPRD Demak memberikan respon yang positif dan menanggapi kejelasan dari berita hoax tersebut. Sehingga fungsi dari humas dapat berjalan sesuai pada ketentuan tugasnya.

Sedangkan informasi dari ketua humas yahya sekretariat DPRD kabupaten Demak yang disampaikan kepada peneliti terkait faktor-faktor yang menghambat jalannya strategi komunikasi politik humas dalam membangun citra positif DPRD di media sosial, yaitu:

strategi komunikasi politik humas terkait dengan Kendala yang terjadi yaitu terkit dengan jaringan internet yang terkadang masih kurang mendukung namun untuk mengatasi hal tersebut dengan menambahkan wifi atau kapasitas jaringan internet. Selain itu juga adanya berita-berita hoax, yang mana berita tersebut bersifat pasif serta belum tentu kebenarannya, sehingga dapat menimbulkan kegaduhan atas berita yang sudah beredar dimedia sosial³⁴

adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat dari strategi komunikasi politik humas DPRD dalam membangun citra positif di media sosial yang menghambat jalanya komunikasi yaitu adanya berita-berita *Hoax* dan juga jaringan

³³ Sri Fahrudin Bisri Selamat, wawancara oleh penulis, 22 Agustus 2022 wawancara 1 transkrip.

³⁴ Yahya, wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2022 wawancara 2 transkrip.

internet yang sering menghambat proses-proses publikasi di media sosial. berita-berita Hoax tersebut menyebar dengan masif, dapat diartikan belum tentu kebenaran berita tersebut, sehingga dapat menghambat proses-proses di media sosial. Penyampaian tersebut selaras dengan apa yang sudah disampaikan ketua DPRD dan juga humas atas faktor-faktor yang menghambat jalannya komunikasi di media sosial.

